

---

## Pemanfaatan Dana Desa untuk Infrastruktur Nagari, Dampaknya terhadap IDM dan Angka Kemiskinan di Sijunjung

**Feri Yurnalis<sup>1</sup>, Asdi Agustar<sup>2</sup>, Osmet<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Pembangunan Wilayah Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

---

### INFORMASI ARTIKEL

#### *Histori Artikel:*

Diterima 16-07-2025

Direvisi 22-08-2025

Diterbitkan 30-09-2025

#### *Keyword:*

Village Fund  
Nagari Infrastructure  
Village Development Index (IDM)  
Poverty  
Sijunjung

### ABSTRACT

*This study focuses on analyzing the utilization of the Village Fund (Dana Desa/DD) for infrastructure development at the nagari (village) level. Specifically, the research will measure the extent to which this fund utilization influences the increase of the Village Development Index (IDM) and the reduction of poverty rates in Sijunjung Regency, West Sumatra. The research employed a mixed-methods approach using secondary data analysis for all 61 nagari and a qualitative multi-case study on selected nagari based on their IDM status. Secondary data collected covered DD allocation, types of infrastructure, IDM scores, and the number of poor residents from 2017 to 2019. The results indicate that DD allocation in Sijunjung was predominantly directed toward the Development Sector (averaging 89.58%), primarily for the construction of village roads. The analysis concludes that the DD allocation for infrastructure does not have a directly significant implication for increasing IDM or reducing the poverty rate in Sijunjung Regency. These findings suggest that the impact of infrastructure investment requires a longer time frame and is influenced by various factors beyond the DD policy for sustainable poverty alleviation.*

---

#### *Corresponding Author:*

Feri Yurnalis,  
Pembangunan Wilayah Pedesaan,  
Universitas Andalas,  
Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Kota Padang, 25163, Indonesia,  
Email: feriyurnalis16@gmail.com

---

## Pendahuluan

Meskipun pembangunan daerah merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional yang berupaya mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 melaporkan adanya kesenjangan kemiskinan yang lebar antara daerah pedesaan dan perkotaan. Secara nasional, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,60%, yang jauh melampaui angka kemiskinan di perkotaan, yaitu 6,56%. Tren kesenjangan ini juga tercermin di Provinsi Sumatera Barat, dengan persentase penduduk miskin pedesaan (7,69%) lebih tinggi daripada di perkotaan (4,71%). Kondisi ini menjadikan desa sebagai fokus utama program pembangunan pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan salah satu poin Nawa Cita Presiden Joko Widodo, pemerintah menganggarkan Dana Desa (DD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang dimulai dari wilayah pinggiran atau pedesaan. Komitmen pemerintah menjadikan desa sebagai tumpuan pembangunan diwujudkan melalui peningkatan Alokasi DD dari Rp60 triliun (2017-2018) ke Rp70 triliun (2019). Inisiatif ini sangat relevan, karena meskipun pembangunan daerah bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, data BPS 2018 memperlihatkan kesenjangan kemiskinan yang signifikan antara daerah pedesaan dan perkotaan.

Beberapa penelitian telah mengkaji dampak DD terhadap pembangunan. Supriantino dkk. (2025) mengungkapkan bahwasanya alokasi DD memberikan dampak yang positif terhadap berbagai aspek, diantaranya: (1) aspek ekonomi, (2) aspek sosial, dan (3) aspek kesehatan masyarakat desa. Selain itu DD juga berhasil meningkatkan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat, serta lebih baiknya fasilitas umum dan

infrastruktur jalan. Hasil serupa juga diungkapkan Ahmad dan Putra (2024) Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada dimensi ketahanan sosial dan lingkungan menunjukkan tren positif serta meningkat signifikan paska pembangunan infrastruktur jalan desa. Sari dan Mulyati (2020) menekankan keberhasilan peningkatan jalan pedesaan itu kunci utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, terutama aksesibilitas ke pasar dan layanan dasar. Sehingga hasilnya dapat berkorelasi positif dengan penurunan biaya transportasi dan peningkatan pendapatan petani.

Secara nasional DD memiliki pengaruh dalam penurunan tingkat kemiskinan. Namun hal tersebut tidak berdampak signifikan pada tingkat kabupaten/kota (Wibawa dan Chehafudin, 2022). Terutama pada desa yang tidak memiliki potensi ekonomi yang kuat untuk dikembangkan (Liana dan Rahardjo, 2022). Kontribusi pembangunan infrastruktur hanya sebesar 0,53% terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian agar manfaat yang dirasakan masyarakat lebih maksimal tentu perlu adanya keberlanjutan dari pemeliharaan infrastruktur tersebut (Zam, 2025). Dan sebaiknya infrastruktur yang dibangun tidak hanya sekadar fisik, DD harus disinergikan dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa. Sehingga fasilitas infrastruktur yang telah dibangun seperti pasar desa atau jalan produksi dapat memberikan manfaat ekonomi langsung terhadap masyarakat desa tersebut (Hasan dkk., 2023). Selain itu juga dibutuhkan keterjaminan pemerataan distribusi ekonomi (Putri dkk., 2024).

Beberapa penelitian lainnya menunjukkan hasil yang kontras, dimana menurut Tang dkk. (2022) pada desa Bana, DD tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakatnya. DD juga belum mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sepenuhnya karena kurangnya perhatian dan alokasi pada sektor kesehatan dan pendidikan yang berkualitas (Wahyu dkk., 2024). Fauzi dkk. (2022) menegaskan bahwa dampak DD sangat bergantung pada karakteristik regional. Hal tersebut terlihat dari hasil regresi data panel yang menemukan bahwa secara agregat, Efektivitas DD hanya terlihat pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang relatif tinggi.

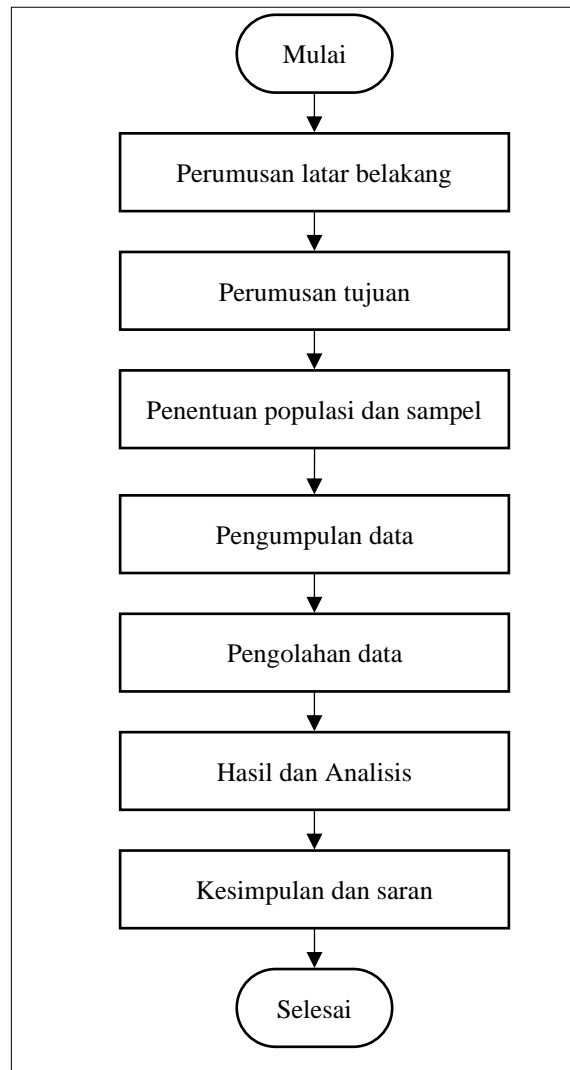
Dari beragam hasil temuan pada kajian-kajian yang membahas terkait DD ini, belum ditemukan secara spesifik mengupas hubungan kausalitas antara pemanfaatan DD untuk peningkatan infrastruktur. Selain itu belum ditemukan juga wilayah penelitian yang memiliki angka kemiskinan spesifik serta mengaitkannya dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan ketiga variabel ini dalam konteks lokal. Penelitian sebelumnya juga cenderung melihat dampak DD secara nasional atau di beberapa desa sampel, tanpa fokus pada daerah yang memiliki karakteristik spesifik dan tantangan kemiskinan yang nyata. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam pemahaman mendalam mengenai bagaimana alokasi DD yang difokuskan pada infrastruktur secara langsung memengaruhi kemajuan desa (diukur dengan IDM) dan penurunan angka kemiskinan pada tingkat nagari.

Penelitian ini menyajikan keterbaruan dengan berfokus pada studi kasus di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang memiliki tantangan kemiskinan yang signifikan. Pada tahun 2019, Kabupaten Sijunjung menduduki posisi kedelapan di Sumatera Barat untuk persentase penduduk miskin, yakni 7,04%, angka yang melebihi rata-rata provinsi (6,42%). Meskipun telah mendapatkan alokasi DD dalam jumlah signifikan setiap tahun, mayoritas nagari di Sijunjung belum menunjukkan kemajuan pesat dan masih terkategori sebagai daerah tertinggal atau berkembang. Dari 61 nagari, hanya 1 nagari yang berstatus mandiri, 10 maju, 35 berkembang, dan 14 tertinggal.

Studi ini berupaya menganalisis secara komprehensif pemanfaatan DD untuk infrastruktur di Kabupaten Sijunjung dan hubungannya dengan IDM serta angka kemiskinan. Secara akademis, studi ini diharapkan dapat memperkaya teori pembangunan wilayah pedesaan, terutama yang menyangkut aspek pendanaan pembangunan. Lebih lanjut, temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan penggunaan DD, baik di Kabupaten Sijunjung maupun di daerah lain dengan karakteristik serupa, serta menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji relevansi DD terhadap tingkat kemiskinan dan investasi infrastruktur desa terhadap peningkatan kualitas hidup.

## Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode gabungan (*mixed methods*). Pendekatan ini memadukan analisis data sekunder dengan studi kasus berganda (*multi-case study*). Analisis data sekunder akan digunakan untuk melihat gambaran umum di seluruh nagari, sementara studi kasus akan memberikan informasi yang lebih mendalam dari beberapa nagari terpilih. Secara garis besar metode penelitian ini dapat tergambar dari diagram alir pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Diagram Alir Penelitian

Sebanyak 61 nagari di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan sebagai populasi dalam penelitian ini. Untuk keperluan analisis, sampel penelitian akan diferensiasi menjadi dua kelompok: (1) Sampel Data Sekunder: Seluruh 61 nagari di Kabupaten Sijunjung akan menjadi sampel untuk analisis data sekunder selama periode tiga tahun terakhir (2017-2019); (2) Sampel Studi Kasus: Untuk mendapatkan informasi kualitatif yang mendalam, akan dipilih satu nagari sebagai studi kasus dari setiap kategori Indeks Desa Membangun (IDM) yang ada di Kabupaten Sijunjung, yaitu nagari dengan status maju, berkembang, dan tertinggal.

Pengumpulan data akan dilakukan melalui dua cara: (1) Data Sekunder: Data sekunder akan dikumpulkan dari laporan resmi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sijunjung, sebagai instansi teknis yang mengelola urusan pembangunan nagari. Data yang dikumpulkan meliputi: (a) Jumlah DD yang diterima setiap nagari; (b) Jenis dan volume infrastruktur yang dibangun menggunakan DD; (c) Nilai skor IDM setiap nagari; (d) Jumlah penduduk miskin di setiap nagari. (2) Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para Wali Nagari yang terlibat dalam studi kasus akan menjadi metode utama untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk melengkapi dan memperdalam informasi mengenai bagaimana DD dimanfaatkan, dampak yang dirasakan, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi IDM dan angka kemiskinan di nagari tersebut.

Analisis data akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi: (1) Analisis Deskriptif: Tahap pertama adalah melakukan analisis deskriptif terhadap data sekunder. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan realitas penggunaan DD untuk infrastruktur, serta perubahan IDM dan jumlah penduduk miskin di seluruh nagari. Rata-rata, persentase, dan grafik akan digunakan untuk menyajikan data secara jelas; (2) Analisis

Korelasional: Untuk menguji hubungan antara pemanfaatan DD terhadap IDM dan angka kemiskinan, akan digunakan metode Tabulasi Silang (crosstabulation) atau tabel kontingensi. Untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara variabel-variabel penelitian sebuah tujuan dari analisis korelasional kami akan menggunakan tabel kontingensi dua dimensi. Teknik ini secara spesifik bertujuan untuk menentukan tingkat asosiasi atau ketergantungan antara variabel-variabel yang diuji; (3) Analisis Kualitatif: Hasil wawancara mendalam dengan Wali Nagari akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan konteks dan penjelasan yang lebih kaya terhadap temuan dari analisis kuantitatif. Tujuannya adalah untuk memahami mekanisme dan faktor-faktor di balik hubungan yang ditemukan, Serta, upaya ini dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif guna memperkaya pemahaman yang tidak dapat diungkapkan melalui data kuantitatif.

### Hasil dan Pembahasan

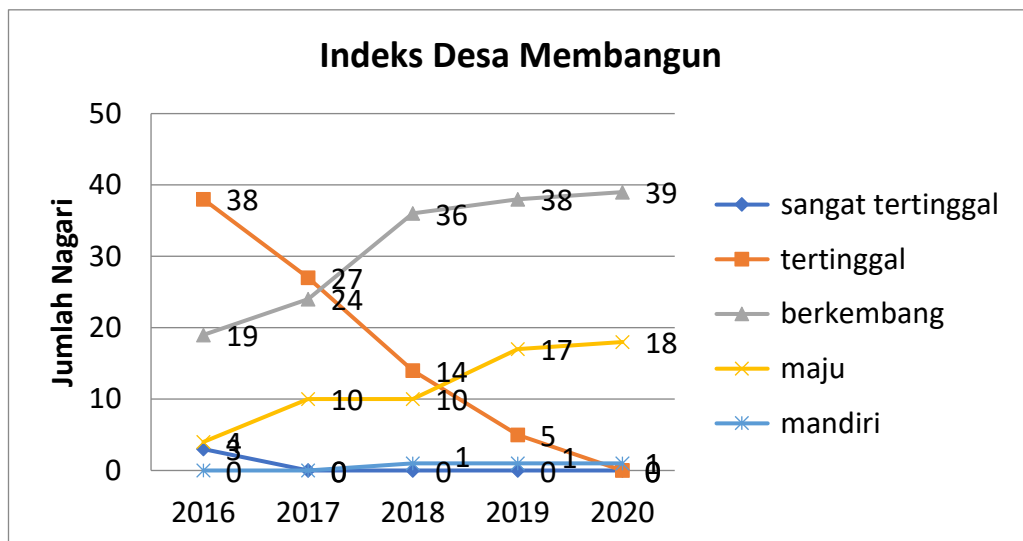
Hasil penelitian ini menyajikan temuan-temuan utama mengenai alokasi dan pemanfaatan DD di Kabupaten Sijunjung dari tahun 2017 hingga 2019. Berdasarkan data yang dihimpun, total alokasi DD yang diterima oleh Kabupaten Sijunjung selama periode tersebut adalah sebesar Rp 542.427.608.000. Dana ini dialokasikan ke 61 nagari (desa) yang ada di wilayah tersebut. Pada **Tabel 1** berikut ini dapat dilihat perkembangan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu dari tahun 2015 hingga 2019.

**Tabel 1.** Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sijunjung

Kategori Nagari	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sangat tertinggal	3	-	-	-	-
Tertinggal	38	27	14	5	-
Berkembang	19	24	36	38	39
Maju	4	10	10	17	18
Mandiri	0	0	1	1	4
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

Dari **Tabel 1** diatas terlihat perkembangan kategori dari 61 nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung, dimana pada tahun 2015 masih terdapat 3 nagari dengan kategori sangat tertinggal, 38 nagari masih kategori tertinggal dan belum ada nagari yang masuk kategori mandiri. Selang 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, tidak ada lagi nagari yang termasuk kategori sangat tertinggal bahkan tertinggal, dan sudah ada 4 nagari dengan kategori mandiri di Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya grafik perkembangan nagari di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada **Gambar 2** berikut ini.



**Gambar 2.** Grafik Indeks Desa Membangun per Kategori

Dari grafik pada Gambar 2 diatas terlihat jelas perkembangan nagari di Kabupaten Sijunjung yang terjadi menuju sesuatu yang lebih baik, dimana grafik nagari dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal menurun curam dan sebaliknya nagari mulai beranjak naik menjadi berkembang, maju, bahkan sudah ada

nagari dengan kategori mandiri. Selanjutnya pada Tabel 2 berikut ini disajikan jumlah DD dan nilai IDM di Kabupaten Sijunjung.

**Tabel 2.** Jumlah Dana Desa dan Nilai IDM di Kabupaten Sijunjung

Tahun	Dana Desa	IDM yang didapat (rata-rata kab.)	Kenaikan
2017	47.874.102.310	0,6442	
2018	36.893.146.345	0,6696	0,0254
2019	47.043.115.807	0,7024	0,0328

Dari Tabel 2 diatas terlihat jumlah DD pada Kabupaten Sijunjung pada tahun 2017 sebesar Rp. 47.874.102.310, kemudian turun pada tahun 2018 menjadi 36.893.146.345 dan kembali naik di tahun 2019 menjadi Rp. 47.043.115.807, namun nilai IDM tetap naik di tahun 2017 yakni sebesar 0,6442 naik menjadi 0,6696 di tahun 2018 dan kemudian naik lagi menjadi 0,7024 di tahun 2019. Walaupun jumlah DD mengalami penurunan namun nilai IDM tetap naik, ini menunjukkan jika DD tidak berpengaruh kepada rata-rata nilai IDM di Kabupaten Sijunjung.

DD dimanfaatkan dan didistribusikan ke dalam empat sektor utama: Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Rata-rata porsi alokasi terbesar yakni 89,58% setiap tahunnya didominasi oleh Bidang Pembangunan. Sementara itu, sisa alokasi didistribusikan untuk Pemberdayaan Masyarakat (7,98%), Pembinaan Kemasyarakatan (1,85%), dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (0,59%).

Adapun implementasi dari pemanfaatan DD tersebut, mayoritasnya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Pada tahun 2017, pembangunan jalan desa menjadi yang paling dominan dengan total panjang 57.376 meter. Selain itu, juga dibangun 14-unit drainase, 2-unit jembatan, 35-unit irigasi, dan 13-unit fasilitas air bersih. Pola yang serupa juga terjadi pada tahun 2018 dan 2019, di mana pembangunan jalan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah nagari pada peningkatan aksesibilitas dan sarana dasar sebagai wujud dari penggunaan DD.

Kemudian dari pengambilan data nagari yang dijadikan kasus perkembangan Dana Desa dan IDM dapat dilihat dari Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.** IDM Nagari Studi Kasus

No	Nagari	Tahun	Dana Desa	Nilai IDM	Status Desa
1	Sibakur	2017	829.417.000	0,7044	berkembang
		2018	759.605.180	0,6278	berkembang
		2019	851.986.036	0,6897	berkembang
2	Tanjung Lolo	2017	889.354.000	0,6966	berkembang
		2018	882.593.000	0,6427	berkembang
		2019	1.029.598.000	0,6778	berkembang
3	Kamang	2017	1.018.006.000	0,6749	berkembang
		2018	887.053.000	0,6997	berkembang
		2019	1.068.036.294	0,7057	berkembang
4	Padang Sibusuk	2017	863.184.605	0,7409	maju
		2018	878.934.040	0,7713	maju
		2019	1.055.187.050	0,8381	mandiri
5	Muaro	2017	912.296.000	0,9083	mandiri
		2018	756.147.880	0,8660	mandiri
		2019	1.050.043.295	0,8292	mandiri

Dari Tabel 3 diatas terlihat untuk Nagari studi kasus juga mengalami hal yang sama dengan rata-rata nilai IDM Kabupaten namun di Nagari Muaro terjadi fluktuasi pada tahun 2018 terjadi penurunan DD dari Rp. 912.296.000 menjadi Rp. 756.147.880 dan penurunan IDM dari 0,9083 menjadi 0,8660, kemudian ditahun 2019 terjadi kenaikan DD menjadi Rp. 1.050.043.295 akan tetapi nilai IDM tetap turun menjadi 0,8292.

### Hubungan Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sijunjung

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa pembangunan desa harus mengikuti kerangka "desa membangun" dan "membangun desa". Kerangka kerja ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup serta mengatasi kemiskinan. Strategi operasionalnya meliputi penyediaan

kebutuhan dasar, pembangunan fasilitas, pengembangan potensi ekonomi daerah, dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Data dari BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun pada rentang tahun 2015 sampai dengan 2020, Kab. Sijunjung selalu memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi dari rata-rata penduduk miskin Sumatera Barat. Dengan persentase Kabupaten Sijunjung 7,29% dan Provinsi Sumatera Barat dengan 6,77%, Kabupaten Sijunjung memiliki rata-rata 0,52% diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada Tabel 4 berikut ini telah disajikan kaitan dana desa dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung.

**Tabel 4. Kaitan Dana Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin**

Tahun	Jumlah dana desa	Jumlah Penduduk Miskin	% kenaikan/penurunan
2017	47.874.102.310	16.550	1,66
2018	36.893.146.345	16.650	(0,60)
2019	47.043.115.807	16.280	2,22

Jumlah penduduk miskin menjadi salah satu komponen perhitungan besaran DD, bersama dengan luas daerah dan faktor geografis. Angka kemiskinan menunjukkan perubahan yang tidak stabil dari 2017 hingga 2019, dengan penurunan 1,66% (2017), kenaikan 0,60% (2018), dan penurunan 2,22% (2019). Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemerintahan nagari-nagari di Kabupaten Sijunjung pada peningkatan aksesibilitas dan sarana dasar sebagai wujud dari penggunaan DD. dengan mayoritasnya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik ternyata tidak secara signifikan mempengaruhi naik turunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil studi Kallu dan Anjelina (2023). Mereka juga menemukan bahwa fokus penggunaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur fisik (misalnya jalan) tidak berkorelasi langsung atau signifikan dengan penurunan kemiskinan, dikarenakan minimnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sifatnya berkelanjutan. Hal ini bisa saja terjadi karena permasalahan manajemen dan kapasitas sumber daya manusianya seperti temuan dari Afriyanni (2022) bahwasanya pengelolaan DD di Sumatera Barat bermasalah terutama pada tahapan perencanaan yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas SDM dan kesulitan yang dialami perangkat nagari saat menyusun dokumen penting seperti RKPD Nagari dan APB Nagari.

Kemungkinan lainnya adalah kendala pada operasional atau manajerial pengelolaan DD di nagari tersebut. Seiring dengan temuan Junaidy dan Hariadi (2023) yang menyimpulkan bahwa secara umum implementasi di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan atau harapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keterbatasan kemampuan aparat desa dalam melaksanakan perencanaan dan pelaporan adalah isu penting. Menurut Kurniawan dan Arifin (2021) Pendamping Desa memegang peran sentral dalam meningkatkan kapasitas ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Dana Desa sangat ditentukan oleh mutu dan efektivitas pendampingan yang mereka berikan. Studi Hasibuan dkk. (2023) menunjukkan bahwa masalah transparansi dan akuntabilitas Dana Desa timbul dari kurangnya kapasitas SDM aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut berimplikasi pada proses pelaporan yang dilakukan sering kali terlambat atau memuat ketidakakuratan data. DD belum mampu menjadi sumber penghasilan tetap; ia hanya berfungsi sebagai gaji tambahan yang terkait dengan pekerjaan infrastruktur, digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian. Kesenjangan anggaran juga memengaruhi keberhasilan infrastruktur. Keterbatasan dana membuat proyek infrastruktur yang dibangun tidak maksimal kegunaannya, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan menjadi tidak signifikan.

Temuan penelitian lainnya menunjukkan adanya kontras pengaruh antara jenis infrastruktur. Secara parsial, peningkatan infrastruktur listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, mengindikasikan bahwa akses listrik yang lebih baik dapat meningkatkan ketimpangan akibat distribusi kegiatan ekonomi yang tidak merata. Sebaliknya, infrastruktur jalan justru memberikan pengaruh negatif signifikan, menyiratkan bahwa peningkatan kualitas jalan berpotensi membantu dalam mengurangi ketimpangan (Santika dan Anandari, 2025). Menurut Iskandar dan Syarif (2022) prioritas penggunaan DD cenderung didominasi oleh pembangunan fisik (infrastruktur jalan), yang mengakibatkan bergesernya fokus utama DD sebagai instrumen untuk penguatan aspek ekonomi dan sosial desa menuju pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian mungkin prioritas penggunaan DD yang selama ini difokuskan pada pembangunan fisik atau infrastruktur harus dikaji ulang sehingga DD mampu menekan angka kemiskinan. Seperti halnya pemanfaatan DD pada sektor pertanian, dimana menurut Wulandari dan Firmansyah (2021) dan Tanjung dkk. (2024) menjelaskan bahwa, alokasi DD yang secara khusus difokuskan pada infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani menunjukkan korelasi kuat dengan peningkatan produksi serta

ketahanan pangan di desa. Hasil akhirnya adalah kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi lokal dan tentunya akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sijunjung selama periode 2017–2019 didominasi oleh pembangunan infrastruktur fisik. Rata-rata porsi terbesar alokasi DD mencapai 89,58% setiap tahunnya dan terfokus pada pembangunan jalan desa, yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan sarana dasar nagari. Namun, temuan penting menunjukkan bahwa alokasi DD yang fokus pada infrastruktur tidak secara langsung berimplikasi signifikan pada kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) maupun penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sijunjung. Meskipun terjadi kenaikan IDM dan fluktuasi angka kemiskinan, DD sebagai faktor tunggal tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak investasi infrastruktur memerlukan waktu yang lebih lama untuk tercermin dalam indikator kesejahteraan, dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kebijakan DD, termasuk minimnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sifatnya berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, periode waktu data yang digunakan (2017–2019) relatif singkat untuk menangkap dampak jangka panjang investasi infrastruktur terhadap IDM dan angka kemiskinan. Kedua, cakupan studi yang hanya berfokus pada Nagari di Kabupaten Sijunjung membatasi kemampuan generalisasi hasil ke daerah lain dengan karakteristik geografis dan sosiologis yang berbeda. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada alokasi dan dampak fisik, sementara variabel kualitatif penting seperti kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam proyek infrastruktur belum dianalisis secara mendalam.

Mengacu pada temuan bahwa alokasi DD untuk infrastruktur belum berdampak signifikan secara langsung, disarankan untuk melakukan studi longitudinal dengan rentang waktu yang lebih panjang (misalnya 5–10 tahun) untuk mengukur dampak investasi infrastruktur nagari secara komprehensif. Kemudian penelitian selanjutnya dapat berfokus pada analisis perbandingan efektivitas DD antara sektor pembangunan infrastruktur dengan sektor pemberdayaan masyarakat, yang penting untuk mengidentifikasi alokasi paling optimal dalam rangka penurunan kemiskinan. Selanjutnya perlu dilakukan penelitian mendalam yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi variabel mediasi (seperti kualitas perencanaan dan transparansi) yang dapat mempercepat konversi pembangunan infrastruktur menjadi peningkatan IDM dan kesejahteraan masyarakat

## Referensi

- Ahmad, S., & Putra, M. F. (2024). Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(2).
- Fauzi, M. D., Agustin, A., & Darmawan, S. (2022). Studi kausalitas Dana Desa dan kemiskinan di Indonesia: Apakah Dana Desa efektif? *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI)*, 22(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.v22i1.1396>
- Hasan, A. T., Arifin, T., & Nugroho, A. (2023). Sinergi Dana Desa dan BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan berkelanjutan. *Jurnal Studi Pemerintahan Lokal*, 7(3).
- Hasibuan, R. R., Susilo, Y., & Darma, Y. P. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1).
- Iskandar, J., & Syarif, H. (2022). Evaluasi implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*, 26(1).
- Junaidy, H., & Hariadi, B. (2023). Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. *SIMBOL (Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan)*, 2(1).
- Kallu, J., & Anjelina, M. (2023). Pengaruh Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(4).
- Kurniawan, D., & Arifin, Z. (2021). Peran pendamping desa dalam peningkatan kapasitas kelembagaan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2).
- Liana, P., & Rahardjo, B. (2022). Sinkronisasi kebijakan Dana Desa dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3).
- Melinda Noer, A., Asrinaldi, & Ansofino. (2020). Pengelolaan Dana Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia (JAPI)*, 10(1).
- Putri, R. Y., Andiny, P., Safuridar, & Martahadi. (2024). Pengaruh peningkatan infrastruktur terhadap ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(3).
- Santika, I. N., & Anandari, I. G. A. A. (2025). Analisis pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *CAPITALIS: Journal of Social Sciences*, 2(3), 47–66.
- Sari, E. Y., & Mulyati, S. (2020). Analisis dampak infrastruktur terhadap kemiskinan melalui aksesibilitas di daerah

- pedesaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi)*, 17(1).
- Supriantino, T., Wahyu, & Setiabudi, T. (2025). Pengaruh program Dana Desa terhadap peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan sosial di desa. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(1).
- Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A., & Maruli, E. (2022). Pengaruh alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 384–399. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7209226>.
- Tanjung, E. T., Yurnalis, F., Hartieni, P., Dharmowijoyo, D. B. E., Wicaksono, A., & Santoso, D. S. (2024). Does involving another person in day-to-day activity-travel participation affect social and mental health? *Journal of Transport and Health*. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101836>.
- Wahyu, T. P., Susanti, L., & Rahmat, A. (2024). Efektivitas pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat (Studi di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik*, 10(1).
- Wahyuni, R., & Dewi, R. (2024). Analisis akuntabilitas pelaporan pembangunan tahun 2018-2023 Nagari Parambahan Kab. Tanah Datar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(04).
- Wibawa, S., & Chehafudin, M. (2022). Evaluasi kebijakan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar air minum serta sanitasi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)*, 10(1). <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i1.94>.
- Wulandari, R., & Firmansyah, A. (2021). Dana Desa dan ketahanan pangan di pedesaan. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, 5(2).
- Zam Zam, M. (2025). Dampak kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 285–299. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6707>.